

# PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KEMITRAAN (Studi Kasus Nelayan Desa Sulamu Kabupaten Kupang NTT)

Selfesina Samadara, Nonce F.Tuati, Heni Matelda Sauw  
Politeknik Negeri Kupang  
E-mail : selfi\_samadara@yahoo.com

## Abstract

Less development of the fisheries sector and its contribution to the PAD, especially traditional fishery business in the village Sulamu predominantly due to the lack of capital. The research objectives: 1) To describe the socio-economic conditions of the fishing village of Sulamu, Kupang. 2) To find a model of partnership in addressing the problem of poverty in the fishing village Sulamu Kupang district. Methods of data collection using survey method, observation method, and the quantitative and qualitative methods. The sampling method using purposive sampling method. Data presented in the form of tabulation and then analyzed descriptively, which results or capital investment, total cost, revenue, and profit in order to obtain the level of welfare of traditional fishermen in the village Sulamu. Analysis of the performance of the economy as a criterion indicates that the undiscounted net gillnet fisheries in the village Sulamu profitable, efficient and feasible to operate with R / C ratio of 1.35 and profitability of 35.39% and a payback period (PP) of 2.8.

**Keywords:** Partnership Models, Poverty, Fishing Communités.

## A. Pendahuluan

Indonesiayang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan memiliki potensi kelautan yang besar, seharusnya

mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup pada potensi kelautan tersebut. Realitasnya, kehidupan masyarakat nelayan senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan sering diidentikkan dengan kemiskinan. Kehidupan masyarakat sangat bergantung pada kondisi alam di wilayah pesisir. Dengan demikian tidak salah jika roda ekonomi yang berjalan sangat bergantung pada bidang perikanan. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat. Hal ini karena kemiskinan diartikan sebagai lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu yang berimplikasi pada lemahnya pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan.

Banyak kasus pengentasan kemiskinan yang dilakukan misal dalam bentuk pemberian bantuan (yang sebenarnya adalah pinjaman yang harus dibayar oleh nelayan) alat tangkap yang tidak mengacu pada kebutuhan nelayan, melainkan sudah ditentukan dari atas, dan cenderung seragam antar berbagai daerah. Sistem bantuan yang bersifat *top down* tersebut mengakibatkan alat bantuan menjadi kurang efektif. Permasalahan lain yang dialami nelayan adalah terkait dengan pemasaran hasil tangkapan. Hal demikian juga dialami oleh nelayan di Desa Sulamu, Kabupaten Kupang. Selam ini, nelayan berusaha melakukan terobosan guna meningkatkan pendapatan dengan mengandalkan tengkulak untuk memasarkan hasil tangkapan, serta meminjam modal untuk pengadaan alat tangkap. Akan tetapi, upaya tersebut justru menyebabkan nelayan terjebak pada ketergantungan dengan pihak lain sekaligus menempatkan diri pada posisi tawar yang lemah.

Pada kondisi seperti tersebut, berakibat potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang melimpah hingga kini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Dampaknya belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan bangsa secara keseluruhan. Masalah yang terjadi adalah sebaliknya, di mana lingkaran setan

kemiskinan terus terjadi di berbagai wilayah pesisir. Terbatasnya akses modal disebabkan karena tidak ada satu pun lembaga keuangan dalam hal ini bank yang ada di Desa Sulamu, baik swasta maupun pemerintah. Faktor lain adalah tidak adanya jaringan kerjasama dengan *stakholder* yang dapat membantu pengembangan baik dari segi pengetahuan maupun teknologi.

Secara umum, nelayan di Desa Sulamu dapat disebut sebagai nelayan tradisional. Nelayan tradisional adalah nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan teknologi penangkapan yang relatif sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, nelayan tradisional lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri. Dalam arti hasil tangkapan yang dijual lebih banyak dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya pangan, dan bukan diinvestasikan kembali untuk pengembangan skala usaha. Hal ini membuat masyarakat desa Sulamu harus memiliki pemahaman yang lebih baik agar masalah sosial yang dihadapi dapat diatasi secara efisien dan efektif.

Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada penangkapan ikan. Keterbatasan teknologi modern, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan. Sarana atau alat tangkap yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan di Desa Sulamu pada umumnya adalah jaring *gillnet*. Jaring *gillnet* merupakan jaring yang berbentuk persegi panjang, mempunyai ukuran mata jaring yang sama pada seluruh bagian jaring agar ikan lebih mudah terjatuh pada mata jaring ataupun terbelit pada badan jaring.

Penelitian ini penting dilakukan karena untuk memberikan informasi tentang hasil tangkapan dan tingkat kesejahteraan nelayan tradisional dengan alat tangkap jaring insang serta mengetahui kondisi sosial dan ekonomi Masyarakat Desa Sulamu. Secara umum, persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan berkisar pada hal-hal yang

berhubungan dengan : (1) kemiskinan dan kesenjangan sosial, (2) keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar, (3) redahnya kualitas SDM. Masalah tersebut telah menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap kehidupan masyarakat nelayan.

Guna mengatasi persoalan masyarakat nelayan tersebut maka diperlukan suatu model kemitraan yang tepat sehinggadapat membantu dalam memperoleh informasi pasar dan teknologi serta akses ke lembaga keuangan. Jaringan lembaga kemitraan dapat dibentuk dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemitraan adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara kelompok usaha kecil dengan pengusaha menengah/ besar maupun dengan pemerintah. Kemitraan usaha perlu dilakukan dengan tujuan agar kelompok masyarakat nelayan dapat memasarkan hasil tangkapannya dengan harga yang wajar dan pantas sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Kemitraan**

Kemitraan adalah adanya kebersamaan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menentukan arah, rencana dan melaksanakan pembangunan daerah (Asianto, 2009). Pemerintah daerah beserta masyarakat dan swasta harus mampu secara efektif mengidentifikasi, menggunakan sumberdaya yang ada dan yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Konsep kemitraan merupakan suatu hubungan kerjasama antarusaha yang dilandasi dengan prinsip saling menunjang dan saling menghidupi berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Kemitraan usaha ini merupakan salah satu strategi bisnis. Setiap pelaku yang terlibat langsung harus memiliki dasar etika bisnis yang dipahami dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraannya.

Kegiatan kemitraan dapat dilakukan pada berbagai kehidupan, seperti : ekonomi, hukum, sosial budaya dan

sebagainya. Dalam kaitannya dengan ekonomi dan bisnis, kemitraan merupakan suatu kesepakatan kerjasama bisnis dari dua pihak atau lebih untuk tujuan meningkatkan kegiatan usaha sehingga memperoleh manfaat lebih besar. Oleh karena itu, masing-masing pihak yang bermitra berkontribusi terhadap asset dan liabilitas serta mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan (Supriatna, Tjahya, 2010). Dalam konteks kebersamaan dan kesepakatan untuk melakukan kegiatan usaha, PP No. 4411997 Pasal8 menyebutkan bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha mikro dan kecil (UMK) dengan usaha menengah (UM) dan atau usaha besar (UB), disertai pembinaan dan pengembangan oleh UM dan atau UB dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

## **2. Struktur Lembaga Kemitraan**

Lembaga kemitraan dalam konsep ekonomi sebaiknya dilihat sebagai kebutuhan untuk mengorganisir kegiatan produksi dan pemasaran, sehingga kinerja produksi dan pemasarannya menjadi lebih efisien. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa kunci sukses suatu lembaga usaha dalam memenangkan pasar yang kompetitif banyak ditentukan oleh kemampuan dalam efisiensi biaya dan sekaligus mempertahankan dan meningkatkan mutu produk.

Sebagai lembaga bisnis yang mempunyai keinginan untuk tetap eksis dan bahkan berkembang dengan baik, maka lembaga kemitraan, baik dalam bentuk koperasi maupun bukan koperasi (perseroan dan sebagainya) memerlukan adanya jaringan. Hal ini penting bagi lembaga bisnis dalam rangka : (i) efisiensi, (ii) memperoleh informasi pasar dan teknologi, dan (iii) memperoleh akses ke lembaga keuangan. Dalam konteks lembaga, maka jaringan lembaga kemitraan dapat dibentuk secara horizontal maupun vertikal, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Namun demikian, lembaga kemitraan bisnis dapat bekerja lebih baik jikadidukung oleh jaringan komunikasisebagai upaya mendapatkan informasi

(*information technology*). Namun, pada umumnya usaha kecil (termasuk koperasi masih belum mengenal hal tersebut dengan baik, karena masih beranggapan frekuensi transaksi dan tingkat produksinya masih rendah.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kemitraan sebagai upaya pengentasan kemiskinan nelayan di Desa Sulamu Kabupaten Kupang NTT. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dipakai sebagai dasar pengambilan sampel adalah :

1. Obyek penelitian adalah nelayan yang menggunakan jaring insang *gillnet*, yang berjumlah 97 orang.
2. Pemasaran hasil tangkapan terbatas pada masyarakat Desa Sulamu dan juga masyarakat luas di pasar ikan Oeba.

Metode analisis data dilakukan dengan Analisis Tingkat Kesejahteraan dan Analisis Finansial Usaha Perikanan.

#### **1. Analisis Tingkat Kesejahteraan**

Pada penelitian ini, pengukuran tingkat kesejahteraan mengacu pada sebelas indikator kesejahteraan yang digunakan Biro Pusat Statistik (BPS).

#### **2. Analisis Finansial Usaha Perikanan :**

##### **1. Analisis R/C ratio**

Analisis rasio penerimaan biaya ditujukan untuk mengetahui besarnya nilai perbandingan penerimaan dan biaya produksi yang digunakan. Rumus perhitungan analisis ini seperti dikemukakan Sisdjatmiko (1990) dan Hernanto (1998) adalah sebagai berikut : Kriteria yang digunakan adalah:  $R/C \text{ ratio} > 1$ , berarti usaha menghasilkan keuntungan sehingga layak untuk dijalankan.  $R/C \text{ ratio} = 1$ , berarti usaha tidak untung dan tidak rugi (impas).  $R/C \text{ ratio} < 1$ , berarti usaha

mengalami kerugian sehingga tidak layak untuk dijalankan.

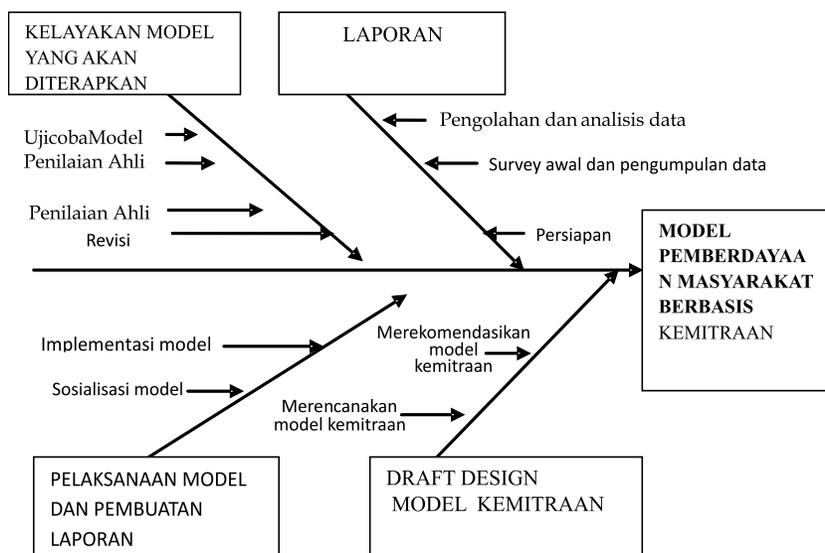
2. Analisis Rentabilitas

Analisis Rentabilitas adalah suatu analisis yang menunjukkan perbandingan antara laba dengan asset atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Nilai rentabilitas di atas 25% menunjukkan bahwa usaha tersebut bekerja pada kondisi efisien dan sebaliknya bila sama atau di bawah 25% (Riyanto, 2001). Dalam kajian ini pengukuran rentabilitas dilakukan dengan pendekatan "rasio asset-laba ekonomi", dengan rumus sebagai berikut : Laba usaha setelah pajak adalah jumlah keuntungan bersih yaitu penerimaan total dikurangi dengan biaya total, sedangkan total asset adalah total investasi awal.

3. Analisis *Payback Period* (PP) atau Periode Pengembalian Investasi (PPI)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui lamanya perputaran modal/investasi dalam usaha. PPI dapat diartikan juga untuk mengetahui waktu yang dapat digunakan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan keuntungan sebagai perbandingan (Riyanto, 2001). Menurut Husnan dan Enny (2004), PP menghitung berapa cepat investasi yang dilakukan bisa kembali. Karena itu hasil perhitungannya dinyatakan dalam satuan waktu (tahun atau bulan).

Gambar 1. Diagram Alir Pencapaian Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berbasis Kemitraan



## D. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang terkait dengan:

- 1) Model kemitraan yang tepat, yang dapat membantu nelayan di Desa Sulamu Kabupaten Kupang dalam rangka meningkatkan pendapatan.
- 2) Pembentukan kemitraan yang diusulkan harus dijalankan dengan melibatkan secara substantial oleh seluruh *stakeholders*.
- 3) Penerima manfaat dari model ini tidak hanya nelayan termasuk juga pedagang perantara yang berkomitmen menjalankan praktik pemasaran yang etis.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, nelayan di Desa Sulamu dapat dikategorikan sebagai nelayan miskin. Kemiskinan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tingkat pendidikan nelayan Sulamu yang rendah, rata-rata hanya tamat SD dan belum banyak tersentuh teknologi

modern. Hal ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja.

- 2) Pola kehidupan nelayan Sulamu yang konsumtif menjadi masalah laten, dimana pada saat penghasilan banyak, hanya diperuntukkan untuk kebutuhan sekunder tanpa berfikir untuk investasi.
- 3) Pemasaran hasil tangkapan terbatas karena ketidakadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal tersebut membuat nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan kepada tengkulak dengan harga di bawah harga pasar.
- 4) Kondisi nelayan di Sulamu belum banyak tersentuh dengan program pemberdayaan ekonomi secara riil, terorganisasi dan berkelanjutan.
- 5) Belum ada LSM maupun institusi Perguruan Tinggi yang secara riil fisik membantu peningkatan ekonomi nelayan.
- 6) Kurangnya akses terhadap modal karena tidak ada lembaga ekonomi perbankan.
- 7) Tidak adanya jaringan kerjasama dengan *stakeholder* lain yang dapat membantu proses perkembangan pengetahuan maupun teknologi.

Kondisi masyarakat Sulamu dikategorikan miskin berdasarkan indikator analisis tingkat kesejahteraan yang dirilis oleh BPS dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Analisis Tingkat Kesejahteraan

No	Indikator Kesejahteraan	Kriteria	Bobot	Skor
1	Pendapatan rumah tangga Berdasarkan konsep garis kemiskinan menurut Sajogyo yang menyertakan pendapatan per kapita per tahun	Tidak miskin	25%	4
		Miskin		3
		Miskin sekali		2
		Paling miskin		1

	dengan konsumsi beras perkapita pertahun			
2	Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan kriteria kemiskinan Direktorat Tata Guna Tanah yang didasarkan pada kebutuhan sembako per tahun	Tidakmiskin	16%	4
		Hampirmiskin		3
		Miskin		2
		Miskinsekali		1
3	Keadaan Tempat Tinggal	Permanen (15-21)	13%	3
	1. Atap :genting (5), esbes (4), seng (3), sirap (2), daun (1)	Semi permanen (10-14)		2
	2.Bilik: tembok (4), Setengah tembok (3), Kayu (3), bambo( 2)	Non permanen (5-9)		1
	3.Status: milik sendiri(3), sewa(2), numpang (1)			
	4.Porselen (5), ubin (4), plester (3), kayu (2), tanah (1)			
	5. luas lantai: > 100m (3), 50-100m (2), < 50m (1)			
4	Fasilitas Tempat Tinggal	Lengkap (21-27)	4%	3
	1. pekarangan: > 100m (3), 50-100m (2), <50m (1)	Cukup14-20		2
	2. Hiburan: video (4), TV (3), tape (2), radio (1)	Kurang (7-13)		1

	3. Pendingin: AC (4), almaries (3), Kipas angin(2), alami (1)			
	3. Penerangan: Listrik (3), petromak (2), lampu temple (1)			
	4. bahan bakar: gas (3), minyak tanah (2), kayuarang (1)			
	6. sumber air: PAM (6), Bor (5), Sumur (4), mata air (3), hujan (2), sungai(1)			
	7. MCK: kamar mandi sendiri (4), kamar mandi umum (3), sungai (2), kebun(1)			
5	Kesehatan Anggota Rumah tangga	Baik (25% seringsakit)	10%	3
	Banyaknya anggota keluarga yang mengalami sakit dalam satu bulan	Cukup (25-50% seringsakit)		2
		Kurang(50% seringsakit)		1
6	Kemudahan Akses Kesehatan	Mudah(17-23)	4%	3
	1. jarak RS terdekat: 0km (4), 0,01 -3 km (3), > 3km (2), missing (1)	Cukup(12-16)		2
	2. jarak kepoliklinik : 0km (4), 0,01 - 2km (3), > 2km (2), missing (1)	Sulit(7-11)		1
	3.biaya berobat : terjangkau (3), cukup			

	terjangkau (2), tidak terjangkau (1)			
	4.penanganan berobat: baik(3), cukup(2), jelek(1)			
	5.kemudahan akses alat kontasepsi : mudah (3), cukup (2), sulit (1)			
	5. konsultasi KB: mudah (3), cukup (2), sulit (1)			
	7.harga obat - obatan : terjangkau (3), cukupterjangkau(2), tidakterjangkau(1)			
7	AksesPendidikan	Mudah (8-9)	12%	3
	1. biaya sekolah : terjangkau (3), cukup terjangkau (2), tidak terjangkau(1)	Cukup(5-6)		2
	2. jarak sekolah: 0 km (3), 0,01-3 km (2), > 3km (1)	Sulit (3-5)		1
	3. prosedur penerimaan: mudah (3), cukup (2), sulit (1)			
8	Kemudahan Akses Transportasi	Mudah (7-9)	4%	3
	1. biaya: terjangkau(3), cukup (2), sulit (1)	Cukup (5-6)		2
	2. fasilitas kendaraan: tersedia (3), cukup (2),	Sulit(3-4)		1

	sulit (1)			
	4. kepemilikan: sendiri (3), sewa (2), ongkos (1)			
9	Kehidupan beragama	Toleransitinggi	4%	3
		Toleransisedang		2
		Toleransirendah		1
10	Rasa Aman Dari Kejahatan	Aman	4%	3
		Cukupaman		2
		Kurangaman		1
11	Kemudahan Akses Olahraga	Mudah	4%	3
		Cukupmudah		2
		sulit		1

Berdasarkan analisis data pada tabel diatas, hasil perhitungan menunjukkan skor 15 yang masuk dalam tingkat kesejahteraan rendah, sehingga masyarakat nelayan desa Sulamu dapat dikatakan miskin. Mensikapi kondisi kemiskinan yang dialami nelayan, tahun 2007 pemerintah pusat melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang meluncurkan program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang secara khusus diarahkan untuk peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di wilayah pesisir. Program ini disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Departemen Perikanan dan Kelautan kepada daerah-daerah yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Adapun jenis karakteristik program ini adalah program pengentasan kemiskinan dengan alokasi dana dari APBN untuk program JPS-PK (Jaring Pengaman Sosial - Pengentasan Kemiskinan).

Dana yang disuntikkan oleh pemerintah daerah telah berhasil dikelola dengan sangat efektif melalui manajemen sederhana dan disalurkan pada pelaksanaan 5 sub program, yaitu :

- 1) Pengadaan 6 unit perahunangkap ikan.
- 2) Pemberian modal usaha pembudidayaan ikan dan udang kepada 2 unit tambak.

- 3) Pemberian modal usaha untuk pengolahan ikan sebanyak 2 unit.
- 4) Pemberian modal usaha untuk pengadaan BBM sebanyak 1 unit.
- 5) Pemberian modal usaha untuk usaha bakulan sebanyak 10 orang.

Dengan bantuan manajemen dari Dinas Koperasi Kabupaten Kupang, program PEMP telah dapat menggulirkan sub program pengadaan perahu penangkap ikan (ukuran sedang untuk 4 penumpang) dari jumlah awal sebanyak 14 menjadi 19 buah dalam jangka waktu 6 bulan. Sub program pengadaan perahu penangkap ikan dilaksanakan dengan memberikan modal kapal kepada para kelompok nelayan (masing-masing kelompok terdiri dari 4 nelayan) dengan kewajiban untuk pengembalian modal melalui angsuran selama 1 tahun.

Saat ini program bantuan berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) telah berakhir di desa Sulamu dan kondisimasyarakat kembaliseperti sedia kala. Melihat kondisi tersebut,peneliti merasa perlu adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan melalui program kemitraan.Model kemitraan adalah salah satu metode kerjasama yang dibangun nelayan dengan *stakeholder* atas dasar saling menguntungkan sebagai salah satu solusi untuk menjawab fakta-fakta ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat nelayan. Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan, yang hasilakhirnyadapat menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Namunfakta yang adaselamainiinteraksi dan kemitraan usaha perikanan hanyaberasaldaripemerintah.Bahkan belum ada satupun lembaga keuangan yang membantupersoalanpermodalandi desa Sulamu.Hal tersebutberdampakpada kurang berkembangnya sektor

perikanan sehingga kontribusi sektor perikanan terhadap PAD masih minim.

### 1. Kemitraan dengan Lembaga Keuangan

Analisis Finansial Usaha Perikanan:

Analisis R/C ratio dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui besarnya nilai perbandingan antara penerimaan/pendapatan dan biaya produksi yang digunakan. Perhitungan R/C ratio usaha penangkapan ikan menggunakan *jaring gillnet* nelayan Desa Aromarea dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2  
Rata-rata R/C Ratio Usaha Penangkapan Jaring *Gillnet*

Uraian	Nilai
Pendapatan	Rp. 1.895.500,00
Biaya Total	Rp. 1.400.000,00
R/C ratio	1,35

Sumber data: Data primer tahun 2015 diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa R/C ratio pada usaha penangkapan ikan dengan *jaring gillnet* lebih dari 1 ( $>1$ ), yang berarti bahwa usaha penangkapan ikan layak dilakukan. Hasil penghitungan R/C ratio sebesar 1,35 menurut Prawiroharjono (2009), menunjukkan bahwa usaha perikanan tangkap *jaring gillnet* sudah menguntungkan dengan rata-rata setiap nelayan melakukan operasi penangkapan memperoleh penerimaan sebesar 1,35 kali lipat atas biaya yang dikeluarkan.

Perhitungan rentabilitas merupakan perbandingan antara keuntungan (pendapatan bersih) selama periode tertentu dengan modal yang dipergunakan untuk menghasilkan keuntungan tersebut. Perhitungan rentabilitas penting karena keuntungan yang besar belum merupakan ukuran bahwa usaha penangkapan tersebut telah bekerja dengan efisien.

Rentabilitas usaha penangkapan ikan dengan *jaring gillnet* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3  
Rata-rata Rentabilitas Usaha Penangkapan *Jaring Gillnet*

Uraian	Nilai
Keuntungan	Rp. 495.500,00
Modal	Rp. 1.400.000,00
Rentabilitas	35,39%

Sumber data: Data primer tahun 2015 diolah

Berdasarkan tabel diatas nilai rentabilitas usaha penangkapan jaring gillnet sebesar 35,39%. Menurut Riyanto (1998), rentabilitas di atas 25% menunjukkan bahwa usaha tersebut bekerja secara efisien dan sebaliknya bila sama atau di bawah 25%. Dengan demikian rasio rentabilitas sebesar 35,39% dapat diartikan usaha tersebut sudah menguntungkan, efisien dan layak beroperasi. Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan asset/modal yang menghasilkan laba.

Perhitungan *payback period* atau periode pengembalian investasi diperlukan untuk mengetahui periode waktu pengembalian investasi sehingga dapat menggambarkan alokasi waktu yang diperlukan agar dana yang diinvestasikan pada usaha dapat diperoleh kembali seluruhnya. Pada usaha penangkapan ikan dengan *jaring gillnet* di Desa Sulamu, perhitungan periode kembali investasi merupakan perbandingan antara modal investasi dengan keuntungan (pendapatan bersih) selama 1 bulan, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4  
*Payback Period* Usaha Penangkapan *Jaring Gillnet*

Uraian	Nilai
Modal	Rp. 1.400.000,00
Keuntungan	Rp. 495.500,00
PP	2,8

Sumber data: Data primer tahun 2015 diolah

Tingkat pengembalian modal dikategorikan cepat jika PP kurang dari 3 tahun, sedang jika lebih dari 3 tahun tetapi kurang dari 5 tahun dan lambat jika lebih dari 5 tahun maka tingkat pengembalian lambat (Riyanto, 2001). Pada usaha penangkapan dengan *jaring gillnet* di Desa Sulamu diperoleh *payback period* rata-rata 2,8. Hal ini berarti kurang dari 3 bulan nelayan sudah dapat mengembalikan modal.

Pendapatan nelayan *jaring gillnet* sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraannya hidup diri dan keluarga. Besarnya pendapatan nelayan sangat bervariasi dipengaruhi oleh banyak faktor seperti keadaan alam (musim, cuaca, kondisi geografis), faktor teknis (skala usaha dan sarana produksi) dan faktor non teknis (kondisi sosial budaya masyarakat). Hasil analisis R/C ratio, rentabilitas dan *payback period* menunjukkan bahwa usaha perikanan *jaring gillnet* merupakan usaha perikanan tangkap dengan kondisi finansial cukup bagus. Hal ini berarti usaha tersebut layak dikembangkan sekaligus mendapat dukungan dari pihak lain terutama lembaga keuangan perbankan. Terdapat banyak lembaga keuangan potensial yang dapat mendukung usaha perikanan tersebut, namun perlu diperhatikan jenis kredit, pembiayaan, serta jasanya sehingga dapat mengoptimalkan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti, terdapat dua buah bank yang layak menjalin kemitraan usaha dengan nelayan Desa Sulamu yaitu Bank Mandiri dan BRI. Bank Mandiri mempunyai program Kredit Usaha Mikro dan Jasa Pelatihan/ Pembinaan, sedangkan BRI mempunyai program Kredit Bisnis

Umum, Kredit Modal Kerja (KMK), dan Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES).

## **E. Simpulan Dan Saran**

### **1. Simpulan**

Nelayan Desa Sulamu dapat dikatakan masih dibawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah, pola kehidupan nelayan yang konsumtif, keterbatasan infrastruktur dan modal, serta minimnya pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Hal tersebut diperparah lagi dengan belum tersentuhnya masyarakat dengan program-program yang dapat mengembangkan ekonomi secara riil, terorganisasi dan berkelanjutan. Ketidakadaan mitra serta lembaga keuangan penunjang menyebabkan sulinya masyarakat lepas dari kemiskinan. Model kemitraan usaha urgent untuk segera dikembangkan baik dengan lembaga keuangan, LSM, perguruan tinggi bahkan pemerintah daerah maupun pusat. Dengan model kemitraan tersebut diharapkan dapat membantu percepatan transfer pengetahuan dan teknologi serta membangun jaringan kerjasama dengan seluruh stakeholder.

### **2. Saran**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka rekomendasi yang harus dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan nelayan Desa Sulamu adalah:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat nelayan, baik melalui program paket maupun sekolah. Dengan peningkatan kualitas pendidikan, kedepan akses perkembangan teknologi kebaharian, peningkatan ekonomi lebih mudah dilakukan.
- b. Perlunya merubah pola kehidupan nelayan. Mengubah *mindset* masyarakat dari konsumtif menjadi produktif. Selain itu perlu membangun diversifikasi mata pencaharian khusus dipersiapkan dalam menghadapi masa

paceklik, seperti industri pengolahan ikan, pengelolaan wilayah pariwisata dan bentuk penguatan ekonomi lain.

- c. Peningkatan kualitas alatangkap dan fasilitas pemasaran. Perlunya dukungan kelengkapan teknologi modern dalam rangka meningkatkan produktivitas.
- d. adanya program kebijakan sosial pemerintah yang bersifat pro masyarakat pesisir. Kebijakan tersebut harus bersifat *bottom up* sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan masyarakat pesisir di tiap - tiap daerah.
- e. Perbaikan infrastruktur baik transportasi, pelabuhan maupun tempat pelelangan ikan.

## **Daftar Pustaka**

- Asianto, S. 2009. *Analisis Pendapatan Masyarakat Pesisir dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Kasus kecamatan Cilincing, Jakarta Utara*. Program Pascasarjana IPB
- Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD). 2002. *Peluang Investasi Dalam Pemberdayaan Otonomi Daerah Propinsi Sumatera Barat*. BKPPMD: Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2007. *Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir*. Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Imron., 2008 *Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta.
- PKMKP. 2007. *Studi Pola Transmigrasi Nelayan di Kawasan Gasan Gadang Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2007*. Kerjasama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat dengan Pusat Kajian Mangrove dan Kawasan Pesisir Universitas Bung Hatta. Padang.
- Rangkuti, F., 2008. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Supriatna, Tjahya, S.U. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Simarmata, H.B. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Suharto, Edi., 2009. *Konsep dan Strategi Pengentasan Kemiskinan menurut Perspektif pekerjaan Social*, Artikel

Suharno., 2009. Model Kemitraan Komoditi Perikanan Tangkap Rakyat, Artikel.

Supriatna, Tjahya, S.U. 2010. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta